

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SYARIAH DANA
HIDAYATULLAH TAHUN 2025



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah
Alamat	Jl. Gedongkuning Selatan No.134 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
Nomor Telepon	0274-2842020

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPRS Dana Hidayatullah pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPRS meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPRS Dana Hidayatullah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPRS Dana Hidayatullah dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPRS Dana Hidayatullah didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPRS Dana Hidayatullah.

BPRS Dana Hidayatullah telah beroperasi lebih dari 19 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPRS Dana Hidayatullah selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPRS Dana Hidayatullah terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal

terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPRS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Anang Basori
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur adalah sebagai berikut:		
1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 2. Melaksanakan manajemen Bank meliputi menyusun perencanaan, pengurusan/ pengelolaan, dan pengawasan kegiatan operasional; 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris. 4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. 5. Mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. 6. Menerapkan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. 7. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan;		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Peningkatan Penerapan Tata Kelola harus dilakukan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank harus lebih dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan khususnya untuk pembiayaan kualitas rendah dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing- masing.
- g. Porsi untuk sektor properti diturunkan dan sektor lainnya dinaikkan untuk penyebaran resiko pada satu sektor besar.

-

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Ita Yulisiyani
----	------	----------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank
3. Melaksanakan pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah.
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
5. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah

2.

Nama

Harry Juliwibowo

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank
3. Melaksanakan pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah.
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
5. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah

perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
f. Menurunkan porsi property dan menaikkan sektor lainnya untuk menyebar resiko pada satu sektor besar.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

BPRS Dana Hidayatullah mempunyai modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- sehingga belum wajib membentuk komite-komite tersebut

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

BPRS belum memiliki komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ita Yulistiyani
	Persentase Kepemilikan (%)	36,46

- Anggota Direksi tidak memiliki saham.
- Komisaris Utama an Ita Yulistiyani memiliki saham pada BPRS Dana Hdiayatullah sebesar 36.46 %

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Ita Yulistiyani
	Nama Kelompok Usaha BPR	Rumah Sakit Islam Hidayatullah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00

	Nama	Ita Yulistiyani
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Satya Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Siti Nur Zamaniah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Rumah Sakit Islam Hidayatullah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Siti Nur Zamaniah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Satya Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	22,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Siti Nur Zamaniah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Asri Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
4.	Nama	Agustina Rahmawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Rumah Sakit Islam Hidayatullah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
5.	Nama	Agustina Rahmawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Satya Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
6.	Nama	Agustina Rahmawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Asri Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00
7.	Nama	Nurul Iman Sjamhudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Rumah Sakit Islam Hidayatullah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
8.	Nama	Nurul Iman Sjamhudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Satya Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	26,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	26,00
9.	Nama	Nurul Iman Sjamhudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Asri Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00
10.	Nama	Herlina Tari Setyawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Rumah Sakit Islam Hidayatullah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
11.	Nama	Herlina Tari Setyawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Satya Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	12,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	12,00
12.	Nama	Herlina Tari Setyawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Hotel Asri Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00

Kelompok Usaha BPRS Dana Hidayatullah terdiri dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah, Hotel Satya Graha dan Hotel Asri Graha dimana para pemegang saham mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris Utama. Selain itu Komisaris Utama BPRS Dana Hidayatullah juga memiliki saham pada usaha-usaha tersebut.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ita Yulistiyani
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Rumah Sakit Islam Hidayatullah
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
2.	Nama	Ita Yulistiyani
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Hotel Satya Graha
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00

Saham Komisaris Utama pada Perusahaan Lain yaitu Rumah Sakit Islam Hidayatullah sebesar 20% dan Hotel Satya Graha sebesar 20%

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Anang Basori
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi pada BPR/BPRS lain
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada hubungan keuangan dengan

Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	anggota Dewan Komisaris pada BPR/ BPRS lain
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham pada BPR/BPRS lain

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ita Yulisiyani
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak terdapat hubungan keuangan dengan anggota direksi lain di BPR/BPRS
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris pada BPR/ BPRS lain
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Terdapat hubungan keuangan dengan Pemegang Saham yaitu dengan PSP.

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Ibu Ita Yulistiyan sebagai Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Bapak Said Noorachman selaku suami sebagai Pemegang Saham Pengendali

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Anang Basori
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksi pada BPR/BPRS lain.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris pada BPR/BPRS lain.
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pada BPR/BPRS lain.

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ita Yulisiyani
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksi pada BPR/BPRS lain.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris Lain di BPR	Dewan Komisaris pada BPR/BPRS lain.
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Terdapat hubungan keluarga Komisaris Utama dengan kelima Pemegang Saham lainnya, yaitu: 1. Said Noorachman (PSP) adalah Suami dari Ita Yulistiyan (Komisaris Utama). 2. Siti Nur Zamaniah (Pemegang Saham) adalah Kakak Ipar dari Ita Yulistiyan (Komisaris Utama). 3. Agustina Rahmawati (Pemegang Saham) adalah Adik Kandung dari Ita Yulistiyan (Komisaris Utama). 4. Nurul Iman Sjamhudi (Pemegang Saham) adalah Adik Kandung dari Ita Yulistiyan (Komisaris Utama). 5. Herlina Tari Setyawati (Pemegang Saham) adalah Adik Kandung dari Ita Yulistiyan (Komisaris Utama).

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Said Noorachman
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksi pada BPR/BPRS lain.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Terdapat Hubungan keluarga dengan Komisaris Utama di BPRS Dana Hidayatullah.
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Terdapat hubungan keluarga dengan kelima Pemegang Saham lainnya, yaitu: 1. Ita Yulistiyan adalah Istri dari Said Noorachman (PSP). 2. Siti Nur Zamaniah (Pemegang Saham) adalah Kakak Ipar. 3. Agustina Rahmawati (Pemegang Saham) adalah Adik Ipar. 4. Nurul Iman Sjamhudi (Pemegang Saham) adalah Adik Ipar. 5. Herlina Tari Setyawati (Pemegang Saham) adalah Adik Ipar.
2.	Nama	Siti Nur Zamaniah
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksi pada BPR/BPRS lain.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Terdapat Hubungan keluarga dengan Komisaris Utama di BPRS Dana Hidayatullah.

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Terdapat hubungan keluarga dengan kelima Pemegang Saham lainnya, yaitu: 1. Said Noorachman (PSP) adalah Adik Ipar. 2. Ita Yulistiyanipemegang Saham) adalah Adik Ipar. 3. Agustina Rahmawati (Pemegang Saham) adalah Adik Ipar. 4. Nurul Iman Sjamhudi (Pemegang Saham) adalah Adik Ipar. 5. Herlina Tari Setyawati (Pemegang Saham) adalah Adik Ipar.
---	---

Terdapat hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan PSP dan pemegang saham lainnya.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp153.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp180.960.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp24.801.165
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp21.808.365

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp24.743.006

Tantiem Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp34.640.209

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp15.667.200
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp5.210.400

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain- Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain- Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Belum terdapat kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	2,10 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	0,00 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,08 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,60 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,91 : 1

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dalam 1 (satu) tahun adalah 2,09 : 1
2. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah dalam 1 (satu) tahun adalah 1 : 0
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah dalam 1 (satu) tahun adalah 1,08 : 1
4. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun adalah 1,6 : 1
5. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun adalah 1,9 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	13 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pemenuhan komposisi pengurus dan evaluasi mutasi karyawan.	
2.	Tanggal Rapat	19 Februari 2025

	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja bulan Januari 2025, evaluasi proporsi pembiayaan, evaluasi Managemen Resiko dan remunerasi pengurus.	
3.	Tanggal Rapat	21 April 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja triwulan pertama, Pembahasan pelaporan APU PPT, dan pembaharuan terkait website Bank	
4.	Tanggal Rapat	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja semester I, evaluasi terkait pendapatan yang belum optimal serta bagaimana strategi yang perlu diupayakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Evaluasi terkait perubahan dalam perhitungan bonus dan lembur karyawan, Efisiensi biaya .	
5.	Tanggal Rapat	23 Juli 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi pencapaian target RBB dan tindak lanjut pencalonan Direksi.	
6.	Tanggal Rapat	14 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja pengangkatan karyawan tetap, SPPD Perjalanan Dinas, Progres penyelesaian pembiayaan bermasalah.	
7.	Tanggal Rapat	08 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pemutus pembiayaan, pengeluaran biaya, penandatanganan bilyet dan pengambilan dana ABA selama direksi umroh.	
8.	Tanggal Rapat	04 November 2025
	Jumlah Peserta	4 orang

	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja triwulan 3, pencapaian target RBB	
9.	Tanggal Rapat	26 November 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Kelengkapan pengurus, pencapaian target RBB, pelaksanaan pelatihan APU PPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan Audit Internal.	
10.	Tanggal Rapat	18 Desember 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rencana penjaualan inventaris, pengadaan Mobil, dan Pemberian gaji ke 13	

Rapat sudah memenuhi sesuai dengan aturan OJK yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ita Yulistiyani
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	10 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Harry Juliwibowo
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	10 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada setiap agenda rapat Dekom sudah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris .

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun	0 kasus

Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun	0 kasus

Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPRS Dana Hidayatullah.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	1 kasus

Terdapat gugatan dari pihak eksternal terkait kepemilikan tanah yang dahulu menjadi jaminan nasabah akan tetapi nasabah tersebut sudah lunas melalui proses lelang.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Ita Yulistiyani
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Komisaris Utama dan Pemegang Saham
	Nama Pengambil Keputusan	Anang Basori
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur
	Jenis Transaksi	Sewa menyewa kantor
	Nilai Transaksi	Rp187.000.000
Keterangan:		
Sudah dilakukan appraisal oleh KJPP dan nilai sewa pasar yaitu Rp. 254.400.000 sedangkan sewa untuk pertahun diperoleh Rp. 187.000.000 dan hal tersebut sudah sesuai tidak melebihi dari nilai appraisalnya.		

-

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	16 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BPRS Bangun Drajat Warga
	Penjelasan Kegiatan	Paket Dhuafa dalam rangka milad ke 31 BPRS Dana Bangun Drajad Warga
	Jumlah (Rp)	Rp750.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	31 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Syuhada
	Penjelasan Kegiatan	Donasi peringatan 50 Tahun IWAPI 500 nasi box untuk Masjid Syuhada
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	27 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BMT Beringharjo
	Penjelasan Kegiatan	Infaq kegiatan ramadhan yang di adakan oleh BMT Beringharjo
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	10 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan dan Rumah Singgah Yatim Muhammadiyah
	Penjelasan Kegiatan	Infaq paket buka puasa untuk panti asuhan dan rumah singgah yatim muhammadiyah
	Jumlah (Rp)	Rp350.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	10 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Amin Yogyakarta
	Penjelasan Kegiatan	Infaq paket buka puasa untuk pondok pesantren Muhammadiyah Al Amin Yogyakarta
	Jumlah (Rp)	Rp350.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat di wilayah Pilahan dan Embung Potorono
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial Ramadhan 1446 H di Wilayah Pilahan dan Embung Potorono
	Jumlah (Rp)	Rp14.850.300
7.	Tanggal Pelaksanaan	14 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Himbari
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial kegiatan hari BPR Syariah 1446 H
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Yatim Mandiri
	Penjelasan Kegiatan	Pengajian dan buka bersama songsong Ramadhan 1446 H bersama anak yatim Yayasan Yatim Mandiri
	Jumlah (Rp)	Rp4.490.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Yatim Mandiri
	Penjelasan Kegiatan	Santunan untuk Yayasan Yatim Mandiri
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	22 Maret 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Himbari
	Penjelasan Kegiatan	Infak dalam rangka donasi Peduli Gaza
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pondok Pesantren Ulul Albab Yogyakarta
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi kegiatan sosial khitan massal Pondok pesantren Ulul Albab Yogyakarta
	Jumlah (Rp)	Rp400.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	02 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Himbari
	Penjelasan Kegiatan	Donasi peduli Sumatra (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat)
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah


Anang Basori, S.P
 Direktur Utama YMFK